

## Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta Tahun 2026

Fifin Arifianti<sup>1\*</sup>, Dwikora Harjo<sup>2</sup>, Endi Idam Yanuar<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [fifin1661@gmail.com](mailto:fifin1661@gmail.com)<sup>1</sup>, [joni.dwikora@gmail.com](mailto:joni.dwikora@gmail.com)<sup>2</sup>, [endiidam.y@gmail.com](mailto:endiidam.y@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

#### Keywords

Strategy, PBB-P2, Regional Tax,  
Regional Revenue Agency,  
Taxpayer Compliance

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the Regional Revenue Agency's strategy in increasing Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenue in Jakarta. This study uses a qualitative approach with a descriptive approach. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and literature review. Informants were selected using purposive sampling, involving officers from the Jakarta Provincial Regional Revenue Agency, taxpayers from North Jakarta, Central Jakarta, East Jakarta, West Jakarta, and South Jakarta, as well as academics. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and drawing and verifying conclusions. The results indicate that the Jakarta Provincial Regional Revenue Agency's strategy in increasing PBB-P2 revenue is implemented through strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. Strategy formulation is carried out through setting tax revenue targets, increasing tax outreach, and developing digital-based services. The strategy is implemented through the implementation of digital tax systems such as iSPPT and online payments, which make it easier for the public to pay taxes. The strategy is evaluated through monitoring tax revenue targets and realization, as well as taxpayer compliance levels. Obstacles faced in increasing PBB-P2 revenue include low taxpayer awareness, economic factors, tax administration constraints, limited understanding of digital systems, and technical disruptions in the online payment system. Efforts to overcome these obstacles include increasing tax awareness, developing digital services, assisting with the use of online payment systems, updating taxable data, and providing tax incentives in the form of administrative sanction waivers or tax amnesty. This research is expected to provide input for the Jakarta Provincial Regional Revenue Agency (BPN) in improving the effectiveness of its PBB-P2 revenue strategy to support regional revenue optimization and taxpayer compliance.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi cukup besar yaitu berasal dari sektor

pajak daerah. Pajak daerah menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan daerah karena berkaitan langsung dengan kepemilikan dan pemanfaatan

bumi serta bangunan yang jumlahnya terus berkembang setiap tahun. Oleh karena itu, pengelolaan PBB-P2 memerlukan sistem administrasi, pendataan, pengawasan, dan pelayanan yang optimal agar penerimaan pajak dapat berjalan secara efektif. Namun dalam praktiknya, pengelolaan PBB-P2 masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya pendataan objek pajak, keterlambatan pembayaran pajak, serta tingginya piutang pajak yang belum terselesaikan.

Tingginya jumlah tunggakan dan piutang pajak menjadi salah satu tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan daerah dan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki sistem pengelolaan PBB-P2 secara berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi salah satu kontributor terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam optimalisasi penerimaannya. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2019–2025

| Tahun | Target PBB-P2        | Realisasi PBB-P2     | Efektivitas |
|-------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2019  | Rp10.000.000.000.000 | Rp9.649.565.555.778  | 96,50%      |
| 2020  | Rp9.450.000.000.000  | Rp8.957.229.158.206  | 94,78%      |
| 2021  | Rp10.250.000.000.000 | Rp8.447.534.001.511  | 82,41%      |
| 2022  | Rp10.250.000.000.000 | Rp8.246.374.877.931  | 80,45%      |
| 2023  | Rp9.000.000.000.000  | Rp9.048.682.494.705  | 100,54%     |
| 2024  | Rp10.500.000.000.000 | Rp9.954.931.380.113  | 99,55%      |
| 2025  | Rp10.500.000.000.000 | Rp10.798.079.640.865 | 105,35%     |

Sumber : Bapenda DKI Jakarta Tahun 2019–2025 (diolah peneliti).

Berdasarkan Tabel I.1 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi selama periode 2019–2023. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2022 menjadi tingkat efektivitas terendah dengan persentase sebesar 80,45%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2 sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

Tabel I. 2 Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD DKI Jakarta Tahun 2019-2025

| Tahun | Realisasi PBB-P2 | Realisasi PAD | Kontribusi |
|-------|------------------|---------------|------------|
|-------|------------------|---------------|------------|

|      |                 |                 |        |
|------|-----------------|-----------------|--------|
| 2019 | Rp9,64 triliun  | Rp45,70 triliun | 21,11% |
| 2020 | Rp8,97 triliun  | Rp37,41 triliun | 23,98% |
| 2021 | Rp8,43 triliun  | Rp41,64 triliun | 20,26% |
| 2022 | Rp8,25 triliun  | Rp45,60 triliun | 18,09% |
| 2023 | Rp9,04 triliun  | Rp49,14 triliun | 18,41% |
| 2024 | Rp9,00 triliun  | Rp50,74 triliun | 17,73% |
| 2025 | Rp10,70 triliun | Rp49,39 triliun | 21,66% |

Sumber : Bapenda DKI Jakarta Tahun 2019-2025 (diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel I.2 diketahui bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta masih berada pada kategori cukup besar dengan rata-rata kontribusi sebesar 20,37%. Hal tersebut menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki peranan penting dalam mendukung penerimaan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PBB-P2 perlu terus dilakukan melalui strategi yang efektif agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah strategis di Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi, industri, perdagangan, jasa, dan permukiman yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Tanjung Priok cukup besar. Tingginya aktivitas ekonomi serta perkembangan kawasan perkotaan menyebabkan jumlah objek pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Madjid (2023) pengertian Administrasi secara etimologis berasal bahasa Yunani dari kata *ad* yang berarti intensif dan *ministrate* artinya melayani, memenuhi, membantu. Administrasi secara terminology dimaknai sebagai mengurus, mengatur, mengelola.
2. **Administrasi Publik** : Pengertian administrasi publik menurut Prajudi Atmosudirojo dalam bukunya Afiyah et al. (2024) adalah administrasi daripada negara sebagai suatu organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya suatu tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.
3. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Pohan (2021), administrasi perpajakan mencakup kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran, pelaporan, pengawasan, dan pelayanan terhadap wajib pajak.
4. **Pajak** : Menurut Mardiasmo (2022), pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang dapat dinikmati secara individual.
5. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2022), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
6. **Pajak PBB-P2** : Sementara itu, menurut Pohan (2021), PBB-P2 merupakan pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena berkaitan langsung dengan perkembangan wilayah, kepemilikan tanah, dan bangunan masyarakat.
7. **Manajemen Strategi** : Definisi pertama diambil dari David & David (2017) bahwa manajemen strategi adalah ilmu dan seni untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan

mengevaluasi keputusan-keputusan bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

8. **Digitalisasi Perpajakan** : Menurut OECD (2023), digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi proses, serta kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

## METODE PENELITIAN

Menurut Haki et al. (2024), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan kondisi nyata di lapangan terkait strategi peningkatan penerimaan PBB-P2, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Untuk memperoleh data yang akurat, komprehensif, dan mendalam dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi teknik dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data. Penggunaan triangulasi teknik bertujuan untuk memperkuat validitas dan keabsahan data yang diperoleh di lapangan, sekaligus memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai strategi Badan Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta.

Melalui triangulasi teknik, data yang diperoleh dari satu metode pengumpulan data dapat dibandingkan dan diverifikasi dengan metode lainnya sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, penggunaan beberapa teknik pengumpulan data juga membantu peneliti memahami kondisi nyata di lapangan secara lebih mendalam seperti observasi, Wawancara Mendalam (In-depth Interview), dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian berupa data sekunder dari Bapenda DKI Jakarta dan data primer melalui wawancara kemudian diinterpretasikan untuk mencari makna. Data sekunder mencakup Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2020–2025:

Tabel IV. 1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2020-2026

| No | Tahun | Target PBB-P2        | Realisasi PBB-P2    | Persentase Capaian |
|----|-------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | 2020  | Rp9.450.000.000.000  | Rp8.957.229.158.206 | 94,78%             |
| 2  | 2021  | Rp10.250.000.000.000 | Rp8.447.534.001.511 | 82,41%             |
| 3  | 2022  | Rp10.250.000.000.000 | Rp8.246.374.877.931 | 80,45%             |
| 4  | 2023  | Rp9.000.000.000.000  | Rp9.048.682.494.705 | 100,54%            |

Sumber: Data Pusdatin Bapenda DKI Jakarta Tahun 2025, data diolah Penulis 2026

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada periode 2020–2025 mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Tabel IV. 2 Data Target dan Realisasi Retribusi DKI Jakarta Tahun 2020-2025

| No | Tahun | Target Retribusi    | Realisasi Retribusi | Persentase Capaian |
|----|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | 2020  | Rp468.413.750.000   | Rp496.332.944.408   | 105,96%            |
| 2  | 2021  | Rp755.755.000.000   | Rp383.859.710.282   | 50,79%             |
| 3  | 2022  | Rp806.878.300.000   | Rp376.977.989.704   | 46,72%             |
| 4  | 2023  | Rp462.105.437.613   | Rp454.697.560.911   | 98,40%             |
| 5  | 2024  | Rp647.749.998.376   | Rp713.719.914.820   | 110,18%            |
| 6  | 2025  | Rp1.054.007.083.058 | Rp1.203.082.198.708 | 114,14%            |

Sumber: Data Pusdatin Bapenda DKI Jakarta Tahun 2025, data diolah Penulis 2026

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi daerah pada periode 2020–2025 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan retribusi berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 105,96%. Akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan mengalami penurunan cukup signifikan dengan persentase capaian masing-masing sebesar 50,79% dan 46,72%. Selanjutnya pada tahun 2023 realisasi penerimaan mulai mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 98,40%. Kemudian pada tahun 2024 dan 2025 realisasi penerimaan retribusi kembali meningkat dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

## Pembahasan

### 1. Strategi Bapenda dalam meningkatkan PPB-P2 DKI Jakarta

Berdasarkan teori David & David 2017 hasil yang didapat :

- 1) Formulasi Strategi : formulasi strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan target penerimaan, peningkatan sosialisasi perpajakan, dan pengembangan pelayanan digital.
- 2) Implementasi Strategi : peningkatan penerimaan PBB-P2 di DKI Jakarta dinilai telah berjalan cukup baik karena didukung oleh modernisasi pelayanan perpajakan dan pemanfaatan teknologi digital.
- 3) Evaluasi Strategi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan evaluasi dan perbaikan strategi melalui peningkatan sosialisasi perpajakan, pengembangan pelayanan digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

### 2. Hambatan Bapenda dalam meningkatkan PPB-P2 DKI Jakarta

- 1) Hambatan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.
- 2) faktor kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa pajak.
- 3) Perubahan data objek pajak yang belum diperbarui menyebabkan proses pengawasan dan penagihan pajak menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi ketepatan administrasi perpajakan dan penerimaan pajak daerah.
- 4) Kemampuan ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran PBB-P2. Sebagian masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi sehari-hari dibandingkan kewajiban perpajakan.

### **3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan Bapenda dalam meningkatkan PPB-P2 DKI Jakarta**

- 1) Badan Pendapatan Daerah juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan melalui pengembangan sistem pembayaran pajak secara digital.
- 2) Badan Pendapatan Daerah adalah melakukan pendampingan pelayanan kepada masyarakat yang belum memahami penggunaan teknologi digital. Hal tersebut dilakukan karena masih terdapat sebagian masyarakat, khususnya masyarakat lanjut usia, yang belum terbiasa menggunakan sistem pembayaran online.
- 3) Selain peningkatan pelayanan dan sosialisasi, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan pemutakhiran data objek pajak secara berkala untuk mengatasi kendala administrasi perpajakan. Pemutakhiran data dilakukan agar informasi objek pajak dan data wajib pajak tetap sesuai dengan kondisi aktual di lapangan sehingga proses pengawasan dan penagihan pajak dapat berjalan lebih optimal.
- 4) Pemberian insentif perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi atau pemutihan pajak untuk mendorong masyarakat melunasi tunggakan PBB-P2.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Bapenda DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 secara umum telah berjalan cukup baik melalui formulasi target yang terukur, implementasi digitalisasi (sistem i-SPPT dan pembayaran online), sosialisasi langsung via RT/RW, serta evaluasi berkala yang terbukti berhasil melampaui target pada periode 2023–2025. Kendati demikian, pelaksanaan strategi ini masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman sistem digital (khususnya bagi lansia), lambatnya pemutakhiran data administrasi, serta gangguan teknis jaringan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bapenda melakukan upaya perbaikan lewat perluasan edukasi, pendampingan teknologi, pemutakhiran data objek pajak, pemberian insentif pemutihan denda, serta evaluasi sistem digital secara berkala demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Afiyah, S., Irawati, Nurdin, M., Zainal, H., & Islah, K. (2024). BUKU AJAR REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK (Efitra, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=F9ntEAAAQBAJ&printsec=frontcover>
- A'isah, Wahyu Pradana, G., Farid Ma'ruf, M., & Fitrie, R. A. (2025). Efektivitas Program Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam Pencapaian Target Pajak Desa Temu Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(3), 573–586. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18411016>
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management: Concepts and Cases – A Competitive Advantage Approach* (16th Edition). Pearson Education.
- Dewi, D. S. K. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi* (J. Harsono, Ed.). Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi Kedua*. Bogor : Mitra Wacana Media. Harjo, D. (2022). *Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan*. Jambi : Deepublish.
- Harjo, Dwikora dan Dani Milleano. (2024). *Perpajakan Atas Industri dan Transaksi Tertentu*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Harjo, Dwikora, et. all (2026). *Kumpulan Teori Pokok Penelitian Buku 1*, Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Madjid, U. (2023). *Pengantar Ilmu Administrasi* (Sony PSL, Ed.). PT Pustaka Interes Media Amani. <https://pustakainteres.com>
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan / Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi.
- Mulya, Khas Sukma, Dwikora Harjo, et all. (2023). *AKUNTANSI PERPAJAKAN : Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. Jambi : Sonpedia.
- OECD, O. for E. C. and D. (2023). *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/74d162b6-en>
- Permana, I. (2023). *BUKU AJAR PENGERTIAN DASAR ADMINISTRASI PUBLIK*. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). <https://books.google.co.id/books?id=LdwaEQAAQBAJ&printsec=frontcover>
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi* (Sobirin, Ed.). CV SAH MEDIA. <https://books.google.co.id/books?id=pVNtDwAAQBAJ&printsec=frontcover>

Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). BUKU AJAR PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (M. T. Multazam & M. D. K. Wardana, Eds.). UMSIDA Press. <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-623-6292-31-0/1049>

Rothaermel, F. T. (2019). Strategic Management (4th Edition). McGraw-Hill Education. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Taufiqurokhman, Wekke, I. S., Saleh, A. M., & Andriansyah. (2021). Pendidikan dalam Tinjauan Adminstrasi Publik: Teori & Praktik (Ana, Ed.). Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). <https://books.google.co.id/books?id=vrVKEAAAQBAJ&printsec=frontcover>

## JURNAL

Delvira, M., & Sadad, A. (2023). 4446-Article Text-13379-1-10-20230717. Journal Ilmiah Wahana Pendidikan, 387–395. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/4446/3601>

Fridolinta Simarmata, D., Subhilhar, & Thamrin, M. (2025). The Effectiveness of the Land and Building Tax Revenue System in Optimizing Regional Original Revenue (PAD) in Serdang Bedagai Regency. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan, 4(2), 69–76. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v4i2.6259>

Fadila, F. (2025). PB+BM+143+v2+n2+2025. Journal Of Sharia Economics, 2, 158–168. <https://journal.manarulilmi.org/index.php/jse/article/view/143/33>

Hadi, A. F., & Mashur, D. (2024). 250-Article Text-1131-1-10-20240902. Jurnal Inovasi Sektor Publik (JISP), 4, 102–112.

<https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/download/250/197>

Haki, U., Prahastiwi, E. D., & Selatan, U. T. (2024). Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan. Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan, 3.

Harjo, Dwikora (2021). Penggalan Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Reformasi Administrasi Vol. 8(1) p.1-9

Harjo, Dwikora dan Dinda Annisa Darmawan (2022). Efektivitas Penagihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Dalam Rangka Meningkatkan Realisasi Penerimaan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2021. Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen Vol. 2 (3) p.238-251

Kurniawan, T., & Wijarnako, B. (2023). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Menumbuhkan Motivasi Kewirausahaan pada Siswa Kelas VII SMP N 1 Kalikajar. Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE), 9.

Novlyani, C., & Darmawan, D. A. (2022). Effectiveness of Collection of Land and Building Tax in the Rural and Urban Sector (PBB-P2) Receivables in Increasing the Realization of Revenue in the Revenue Agency of Bekasi City Area in 2019-2021. Ilomata International Journal of Tax and Accounting, 3(3), 307–319. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i3.531>

Purwato, et. all (2024). Analysis Analysis of the Effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax Collection Based on E-SPPT PBB-P2 in Increasing Regional Tax Revenue in the Seribu Islands UPPD in 2021. Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi dan Keuangan. Vol. 3 (1)

p. 177-188. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD